



Collaborative Governance Berbasis Triple Helix dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjar

Triple Helix-Based Collaborative Governance in Handling Violence Against Women and Children in Banjar City

Entin¹, Nova Chalimah Girsang², Tofan Ibrahim³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar, Kota Banjar, Indonesia
entinsuyono@gmail.com, novahalimah38@gmail.com, tofanibrahim94@gmail.com

Abstrak

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, terus meningkat secara signifikan. Meskipun kajian mengenai tata kelola kolaboratif telah banyak dilakukan, analisis mendalam mengenai hambatan struktural dalam sinergi triple-helix di tingkat pemerintah daerah kecil masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana model collaborative governance melalui sinergi triple-helix (pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha) berjalan dalam menangani kasus tersebut di Kota Banjar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama sepuluh informan kunci dari lintas sektor, seperti Dinsos P3A, UPTD PPA, Polres, Dinas Kesehatan, perwakilan perguruan tinggi, serta pengusaha lokal. Analisis data menerapkan model kolaborasi Ansell dan Gash (2008). Hasil studi menunjukkan bahwa unsur pemerintah telah mengimplementasikan komitmen prosedural dengan baik melalui alur rujukan terpadu dan inovasi "Gelung Perak", sementara akademisi berkontribusi melalui program riset dan edukasi mandiri. Namun, keterlibatan dunia usaha dalam pemulihan ekonomi korban belum optimal dan bersifat insidental akibat belum adanya regulasi yang tegas serta pembagian peran yang konkret dalam kelembagaan jangka panjang. Di samping itu, ketiadaan sistem data digital terpadu menghambat integrasi antarinstansi dan memicu asimetri informasi. Kesimpulannya, kolaborasi rintisan ini baru mencapai keberhasilan awal (small wins). Secara teoritis dan praktis, penelitian ini memperkaya kajian collaborative governance pada konteks perlindungan sosial di daerah dengan kapasitas kelembagaan terbatas, sekaligus menegaskan bahwa penguatan regulasi formal dan integrasi basis data satu pintu mutlak diperlukan untuk keberlanjutan tata kelola.

Kata Kunci: *Collaborative Governance; Perlindungan Perempuan dan Anak; Triple Helix; Tata Kelola Kolaboratif; Kota Banjar.*

Abstract

Violence against women and children in Indonesia, particularly in West Java Province, continues to rise significantly. While studies on collaborative governance are extensive, in-depth analysis regarding structural barriers in triple-helix synergy at the small local government level remains limited. This study aims to analyze the extent to which the collaborative governance model operates through a triple-helix synergy (government, academia, and business actors) in addressing these cases in Banjar City. Utilizing a descriptive qualitative method with a case study approach, data were gathered through in-depth interviews with ten key informants across various sectors, including the Department of Social Affairs, Women's Empowerment, and Child Protection (Dinsos P3A), the Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA), the Indonesian National Police (Polres), the Department of Health, university representatives, and local entrepreneurs. Data analysis applied the collaboration model by Ansell and Gash (2008). The findings indicate that the government sector has effectively implemented procedural commitments through an integrated referral workflow and the "Gelung Perak" innovation, while academia contributes independently through research and grassroots education

programs. However, the involvement of the business sector in the economic recovery of victims remains suboptimal and incidental due to the absence of strict regulations and concrete role distribution within the long-term institutional framework. Furthermore, the lack of an integrated digital data system hinders inter-agency integration and triggers information asymmetry. In conclusion, this pioneering collaboration has only achieved initial progress (small wins). Theoretically and practically, this study enriches the literature on collaborative governance within the context of social protection in regions with limited institutional capacity, while emphasizing that strengthening formal regulations and integrating a single-gate database are imperative for sustainable governance.

Keywords: Collaborative Governance; Women and Children Protection; Triple Helix; Collaborative Governance; Banjar City.

I. PENDAHULUAN

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan fenomena sosial yang problematis karena tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan ke permukaan (*underreported cases*). Tren data menunjukkan eskalasi yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Merujuk pada data nasional Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), grafik kasus naik dari 29.883 kasus pada 2023 menjadi 31.974 kasus di sepanjang 2024. Pola pertumbuhan yang sama terlihat di tingkat regional Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini mencatat lonjakan yang cukup eksponensial; dari 1.343 kasus pada 2022, bergerak ke angka 2.446 kasus di 2023, hingga menyentuh 3.084 kasus pada 2024. Realitas empiris ini menjadi indikator kuat bahwa pola intervensi konvensional yang bertumpu penuh pada peran tunggal pemerintah sudah tidak lagi adaptif merespons dinamika di lapangan.

Karakteristik kekerasan kontemporer saat ini tidak lagi sebatas pada dimensi penegakan hukum pidana semata. Bentuk kekerasan telah bermutasi menjadi lebih laten, meliputi tekanan psikologis, privasi ekonomi domestik, hingga eksploitasi berbasis ruang digital. Ketika akar masalahnya berkelindan dengan problem kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan kultur patriarki yang mapan, kapasitas kelembagaan satu instansi sektoral dipastikan akan menghadapi keterbatasan mendasar jika bergerak secara parsial. Atas dasar itu, pengujian terhadap model tata kelola alternatif berbasis kemitraan lintas sektor menjadi sangat krusial, terutama pada wilayah penyangga atau daerah perlintasan seperti Kota Banjar.

Dipilihnya Kota Banjar sebagai lokus penelitian didasarkan pada karakteristik geografis dan demografisnya yang spesifik. Wilayah ini berfungsi sebagai koridor utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap), sehingga memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta interaksi sosial yang cair. Heterogenitas masyarakat di daerah perlintasan antarprovinsi ini menyimpan kerentanan struktural tersendiri terhadap potensi gesekan sosial, termasuk kerawanan terjadinya tindak kekerasan di ranah domestik maupun publik.

Untuk menjaga fokus kajian, penelitian ini membatasi ruang lingkup analisis pada rintisan komunikasi, dinamika interaksi, serta komitmen yang terbangun di

antara tiga aktor utama (*triple helix*), yakni birokrasi pemerintahan, institusi akademisi, dan sektor dunia usaha dalam kurun waktu kebijakan saat ini. Studi ini tidak didesain untuk menganalisis aspek hukum pidana materiel dari peradilan anak dan perempuan, melainkan menitikberatkan pada aspek manajemen koordinasi lintas sektor dalam skema pencegahan, penanganan taktis, hingga pemulihan psikososial korban. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *collaborative governance* model *triple helix* dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar, mengidentifikasi hambatan struktural di lapangan, serta merumuskan strategi pemecahan masalah yang telah diimplementasikan.

Secara teoretis, analisis tata kelola kolaboratif dalam studi ini mengacu pada model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). Mereka menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan sebuah desain kelembagaan formal yang melibatkan aktor non-negara dalam forum pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada konsensus demi menyukseskan kebijakan publik. Keberhasilan model ini ditentukan oleh siklus dinamis yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi itu sendiri. Perspektif ini kemudian diintegrasikan dengan konsep Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Jaelani, 2019) yang menekankan pembagian peran fungsional: pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai penyedia basis pengetahuan melalui riset, serta dunia usaha sebagai pendukung logistik dan instrumen pemberdayaan ekonomi pasca-kasus bagi para penyintas.

Beberapa literatur terdahulu sebenarnya telah banyak menguji model tata kelola kolaboratif dalam isu perlindungan sosial. Studi dari Sari (2020) mengenai penanganan kekerasan perempuan di Kota Bandung menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor sering kali terjebak pada formalitas administratif dan mengalami dilema konsistensi akibat dominasi figur pemerintah yang terlalu kuat. Sejalan dengan hal itu, temuan Utami (2021) mengonfirmasi bahwa efektivitas penanganan isu gender di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan daerah serta kerelaan aktor non-pemerintah dalam memobilisasi sumber daya yang mereka miliki.

Meskipun demikian, mayoritas studi terdahulu memiliki keterbatasan fokus karena lebih banyak mengambil lokus pada kota-kota metropolitan atau wilayah dengan kapasitas fiskal yang mapan. Di sinilah letak kekosongan literatur (*research gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini. Belum banyak kajian yang melihat bagaimana hambatan struktural dalam interaksi *triple helix* khususnya keterlibatan sektor swasta bekerja pada konteks daerah otonom kecil yang memiliki keterbatasan ruang fiskal serta infrastruktur digital yang belum terintegrasi. Dalam berbagai literatur sebelumnya, sektor usaha biasanya hanya diposisikan sebagai *donatur insidental*, bukan bagian dari kelembagaan tata kelola yang terintegrasi jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, posisi artikel ini menjadi penting untuk mengisi ruang kosong tersebut. Penelitian ini memosisikan diri sebagai pengaya literatur

yang menganalisis bagaimana formula *triple helix* diuji pada wilayah otonom dengan kapasitas kelembagaan dan fiskal terbatas seperti Kota Banjar. Dengan demikian, artikel ini secara eksplisit berkontribusi dalam memperkaya kajian *collaborative governance* pada konteks perlindungan sosial di daerah dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan regulasi formal dan integrasi basis data satu pintu di tingkat daerah.

II. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Secara metodologis, pilihan studi kasus ini merujuk pada pemikiran Robert K. Yin (2018) yang menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi teoretis yang paling valid untuk menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas. Dalam riset ini, tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam penanganan kekerasan di Kota Banjar merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosiokultural, kapasitas fiskal daerah, dan regulasi lokal. Pendekatan kualitatif deskriptif diaplikasikan untuk menyajikan gambaran yang rinci, faktual, dan apa adanya mengenai bagaimana pola komunikasi, dinamika interaksi, dan pembagian peran fungsional antar-aktor *triple helix* (pemerintah, akademisi, dan dunia usaha) berjalan di lapangan tanpa adanya manipulasi eksperimental.

2. Lokus dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokus dilakukan secara sengaja pada instansi dan institusi yang membentuk ekosistem *collaborative governance* model *triple helix* dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang lingkup tempat penelitian meliputi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Banjar, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banjar, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar dan Institut Miftahul Huda Al-Azhar selaku representasi akademisi, serta jaringan pelaku usaha swasta lokal di Kota Banjar. Aktivitas penelitian lapangan, mulai dari survei pendahuluan, pengumpulan data, hingga analisis dokumen, dijadwalkan secara terstruktur dari bulan Oktober 2025 hingga Juni 2026.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria teoretis dan praktis yang selaras dengan kebutuhan data riset. Kriteria inklusi informan yang ditetapkan oleh peneliti meliputi: (1) memiliki otoritas formal dalam perumusan kebijakan atau pelaksanaan pelayanan penanganan kekerasan, (2) terlibat aktif secara operasional dalam jaringan koordinasi lintas sektor di Kota Banjar,

dan (3) memiliki masa keterlibatan atau masa kerja dalam isu perlindungan perempuan dan anak minimal selama 1 (satu) tahun. Pengumpulan data terus berjalan secara fleksibel dan baru dihentikan ketika mencapai titik jenuh (data saturation), di mana informasi dari informan baru tidak lagi memunculkan variasi tema atau kode baru di lapangan. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan 10 informan kunci sebagai berikut:

No	Informan Kunci	Unsur Triple Helix	Alasan Pemilihan Informan
1	Kepala DINSOSP3A Kota Banjar	Pemerintah	Memiliki otoritas struktural tertinggi dalam perumusan kebijakan, alokasi anggaran daerah, dan pengawasan makro pelayanan perlindungan sosial.
2	Kepala Bidang PPA DINSOSP3A	Pemerintah	Mengendalikan koordinasi teknis operasional lintas sektoral dan memantau kinerja rujukan kasus di daerah.
3	Polres Kota Banjar	Pemerintah	Menjadi garda terdepan dalam manajemen teknis unit layanan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen kasus, hingga rujukan pemulihan korban.
4	Dinas Kesehatan Kota Banjar	Pemerintah	Memegang otoritas yudisial dalam proses penyidikan, penegakan hukum pidana, serta penjaminan perlindungan keamanan fisik korban.
5	Kepala UPTD PPA Kota Banjar	Pemerintah	Bertanggung jawab atas koordinasi penanganan medis, pembiayaan perawatan kesehatan korban, dan fasilitasi visum et repertum.
6	Ketua STISIP Bina Putera Banjar	Akademisi	Memimpin perguruan tinggi lokal yang mengintegrasikan kajian kebijakan publik dengan program edukasi jender di akar rumput.
7	Ketua Institut Miftahul Huda Al-Azhar	Akademisi	Mengoordinasikan kontribusi riset akademik dan pengabdian masyarakat berbasis nilai keagamaan dalam pencegahan kekerasan.
8	Pengusaha Kota Banjar	Dunia Usaha	Representasi sektor bisnis (UMKM dan industri kuliner) yang terlibat dalam inisiasi program CSR dan pelatihan kemandirian ekonomi korban.
9	Pengusaha Kota Banjar	Dunia Usaha	Representasi sektor bisnis (UMKM dan industri kuliner) yang terlibat dalam inisiasi program CSR dan pelatihan kemandirian ekonomi korban.

No	Informan Kunci	Unsur Triple Helix	Alasan Pemilihan Informan
10	Pengusaha Kota Banjar	Dunia Usaha	Representasi sektor bisnis (UMKM dan industri kuliner) yang terlibat dalam inisiasi program CSR dan pelatihan kemandirian ekonomi korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling mengonfirmasi, peneliti memadukan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri atas tiga metode utama:

- Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*): Dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini difokuskan untuk menggali persepsi, pembagian tanggung jawab, bentuk komitmen, serta hambatan struktural yang dialami oleh masing-masing aktor *triple helix*.
- Observasi Non-Partisipan: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap suasana pelayanan di Dinsos P3A, mekanisme pencatatan data pelaporan, serta interaksi antar-instansi dalam forum koordinasi tanpa terlibat langsung dalam aktivitas teknis lembaga.
- Studi Dokumentasi: Pengumpulan dokumen resmi untuk memperkuat validitas data primer. Dokumen yang ditelaah meliputi data statistik kasus tahunan dari Simfoni PPA Kota Banjar, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan UPTD PPA, serta dokumen regulasi lokal seperti Peraturan Wali Kota Banjar Tahun 2025 yang melandasi pembentukan unit kelembagaan tersebut.

5. Tahapan Analisis Data Tematik

Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dijalankan secara interaktif dan simultan sejak peneliti berada di lapangan, mengikuti model analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Langkah-langkah operasional analisis data tematik dijabarkan sebagai berikut:

- Tahap Pengodean (*Coding*): Peneliti mengubah hasil rekaman wawancara menjadi transkrip tekstual secara utuh (*verbatim*). Selanjutnya, dilakukan pembacaan secara mendalam untuk memberikan kode atau label konseptual pada unit kalimat yang relevan dengan fokus penelitian. Sebagai contoh, pernyataan informan mengenai ego sektoral diberi kode "*Asimetri-Info*", sedangkan pernyataan tentang komitmen swasta diberi kode "*CSR-Insidental*".
- Kategorisasi Data: Kode-kode yang memiliki karakteristik makna yang sejenis disaring dan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih spesifik. Data yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan penelitian direduksi agar peneliti tetap fokus pada rumusan masalah. Kategori yang terbentuk antara lain: "Hambatan Regulasi Formal", "Ketergantungan Fiskal Daerah", dan "Kemandirian Riset Akademisi".

- c. Pembentukan Tema (*Thematizing*): Kategori-kategori tersebut kemudian dihubungkan dan diintegrasikan ke dalam tema-tema besar yang mengacu pada komponen teoretis model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008), yang meliputi: (a) Kondisi Awal Kolaborasi (*Starting Conditions*), (b) Desain Kelembagaan (*Institutional Design*), (c) Kepemimpinan Fasilitatif, dan (d) Proses Kolaborasi di Lapangan.

6. Uji Keabsahan Data (*Trustworthiness*)

Untuk memastikan derajat kepercayaan dan validitas ilmiah dari data yang dikumpulkan, peneliti menerapkan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan data hasil wawancara yang diperoleh dari unsur pemerintah (Dinsos P3A dan UPTD PPA) dengan keterangan dari unsur penegak hukum (Polres Banjar) serta perspektif kritis dari unsur akademisi.
- b. Triangulasi Teknik: Membandingkan kesesuaian antara data verbal yang diucapkan informan pada saat wawancara mendalam dengan realitas perilaku yang terpantau pada saat observasi di unit layanan, serta bukti otentik tertulis yang tercantum dalam dokumen pelaporan kasus resmi atau SOP kelembagaan.
- c. *Member Check*: Melakukan konfirmasi ulang dengan menyerahkan kembali draf transkrip wawancara atau kesimpulan sementara kepada informan kunci untuk memastikan bahwa data yang ditulis oleh peneliti telah sesuai dengan maksud asli yang disampaikan oleh informan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kondisi Awal (*Starting Conditions*): Ketimpangan Kapasitas dan Relasi Kuasa Antar-Aktor

Dimensi kondisi awal (*starting conditions*) dalam model Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa latar belakang hubungan, keseimbangan kekuasaan (*power relations*), dan insentif untuk berkolaborasi sangat menentukan jalannya tata kelola. Di Kota Banjar, analisis empiris menunjukkan adanya asimetri kapasitas yang tajam antara sektor pemerintah dan non-pemerintah. Dominasi birokrasi pemerintahan dalam hal ini Dinas Sosial P3A dan UPTD PPA terlihat sangat mencolok karena mereka menguasai legalitas formal, instrumen regulasi, dan basis anggaran kedinasan. Sebaliknya, unsur akademisi dan dunia usaha cenderung diposisikan sebagai aktor pelengkap yang gerakannya bersifat pasif dan bergantung pada stimulus pemerintah.

Asimetri kekuasaan ini berdampak langsung pada lemahnya insentif internal bagi aktor eksternal birokrasi untuk bergerak secara mandiri.

Sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Bidang PPA Dinsos P3A Kota Banjar dalam wawancara lapangan:

"Selama ini, kalau bukan kami dari dinas yang mengetuk pintu atau mengundang rapat, hampir tidak ada pergerakan mandiri dari sektor lain. Sektor swasta merasa ini murni urusan dinas, sementara kampus baru bergerak kalau ada memorandum tertulis atau agenda KKN." (Wawancara, 12 Februari 2026).

Realitas ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam *governance network* di Kota Banjar, di mana relasi yang terbangun tidak setara. Kondisi asimetris ini, menurut kerangka teoritis Ansell dan Gash (2008), mewajibkan adanya upaya pemberdayaan (*empowerment*) aktor pendukung di tahap awal untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (*ownership*) yang seimbang terhadap isu perlindungan sosial.

Temuan ini memperkuat studi Utami (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas penanganan isu gender di tingkat lokal sangat determinan terhadap kapasitas kelembagaan daerah. Bedanya, di Kota Banjar yang merupakan daerah otonom kecil dengan keterbatasan ruang fiskal, ketimpangan kapasitas ini tidak hanya dipicu oleh keengganan aktor non-pemerintah untuk membagi sumber daya, melainkan dipicu oleh belum adanya mekanisme insentif daerah yang mampu menarik minat sektor swasta untuk terlibat aktif.

2. Desain Kelembagaan (Institutional Design): Regulasi Sektoral dan Hambatan Komunikasi Lintas Sektor

Sumbatan paling krusial yang ditemukan dalam jaringan tata kelola di Kota Banjar berakar pada dimensi Desain Kelembagaan (*institutional design*). Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa desain kelembagaan yang ideal mensyaratkan adanya aturan main (*rules of the game*) yang jelas, inklusif, transparan, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang tersedia saat ini baru bersandar pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjar Nomor 12 Tahun 2025. Perwali ini secara hukum bersifat internal-birokratis, artinya hanya mengikat unit kerja UPTD PPA, Dinsos P3A, dan jajaran dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

Ketiadaan payung hukum kolektif lintas sektor yang bersifat top-down antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lingkaran dunia usaha memicu goyahnya kepastian keberlanjutan program. Dampak fatalnya adalah munculnya hambatan komunikasi kolaboratif di lapangan. Ketika diminta keterangan mengenai dasar hukum kerja sama lintas sektor, Kepala UPTD PPA Kota Banjar mengungkapkan kegelisahannya:

"Perwali 2025 itu kuat untuk mengatur alur kerja kami di UPTD dan koordinasi dengan Polres atau Dinkes. Tapi begitu kami mau menyentuh perusahaan makanan atau rumah makan lokal untuk program pemulihan korban, Perwali itu tidak punya taji hukum untuk memaksa mereka. Hubungan kami dengan swasta akhirnya hanya berdasarkan asas kesukarelaan dan pendekatan personal saja." (Wawancara, 24 Februari 2026).

Kondisi hukum yang longgar ini memicu terjadinya fragmentasi peran dan melemahkan koordinasi kelembagaan. Pihak swasta menganggap penanganan kekerasan adalah domain mutlak pemerintah, sementara pemerintah kesulitan membangun posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat untuk melibatkan lingkaran bisnis. Fenomena formalitas administratif ini sejalan dengan temuan Sari (2020) di Kota Bandung, yang menegaskan bahwa kemitraan sering kali rapuh dan sulit mempertahankan konsistensi jangka panjang apabila ketergantungan terhadap figur pemerintah masih terlampaui dominan dan belum dilembagakan dalam regulasi multitafsir yang mengikat aktor non-negara.

3. Proses Kolaboratif (Collaborative Process): Hambatan Asimetri Informasi dan Ketiadaan Basis Data Satu Pintu

Dalam dimensi proses kolaboratif (*collaborative process*), keberhasilan tata kelola sangat ditentukan oleh intensitas dialog tatap muka, proses membangun kepercayaan (*trust building*), serta transparansi informasi. Di Kota Banjar, siklus ini mengalami hambatan serius akibat ketiadaan infrastruktur teknologi berupa sistem data digital terpadu satu pintu. Proses kompilasi, verifikasi, dan pelaporan kasus kekerasan masih dikelola secara konvensional dan terpisah pada masing-masing instansi. Format klasifikasi jenis kekerasan yang digunakan oleh UPTD PPA, Unit PPA Polres Banjar, dan layanan medis di Dinas Kesehatan sering kali berbeda, sehingga memicu ketidaksinkronan data tahunan.

Dampak dari tidak terintegrasinya basis data digital ini dikonfirmasi langsung oleh Kanit PPA Satreskrim Polres Banjar:

"Kerap terjadi keterlambatan sinkronisasi data kasus di lapangan. Kami di kepolisian punya standar input sendiri, UPTD punya sendiri, rumah sakit untuk visum juga sendiri. Karena sistemnya belum one-gate (satu pintu), kami sering harus mencocokkan data secara manual lewat excel. Ini memperlambat penanganan taktis dan memicu tumpang tindih informasi." (Wawancara, 3 Maret 2026).

Dari perspektif komunikasi sosial dan teori Ansell dan Gash (2008), kurangnya keterbukaan serta adanya asimetri informasi lintas sektoral ini merupakan faktor pelemah yang dapat mengikis trust antar-aktor. Ketika data bergerak dalam ruang yang remang-remang, kecurigaan ego-sektoral antar-instansi rawan muncul, terutama terkait klaim performa kerja, efektivitas penyerapan anggaran daerah, dan akuntabilitas penanganan kasus. Hambatan teknologis ini menjadi batu sandungan yang mengancam keberlanjutan seluruh siklus kolaborasi dalam jangka panjang.

4. Evaluasi Kontribusi Aktor: Antara Kontribusi Swadaya Akademisi dan Komitmen Insidental Dunia Usaha

Sinergi triple helix yang kokoh menuntut adanya pembagian peran fungsional yang seimbang. Di Kota Banjar, unsur akademisi yang diwakili oleh

STISIP Bina Putera Banjar dan Institut Miftahul Huda Al-Azhar telah berusaha mengambil peran di lini hulu (pencegahan). Kontribusi nyata mereka mewujud dalam pelaksanaan riset pemetaan daerah rawan konflik sosial serta edukasi pengarusutamaan jender di tingkat desa. Namun, karena tidak adanya komitmen formal jangka panjang seperti *Memorandum of Agreement* (MoA) yang tersistem, kontribusi kampus masih bersifat swadaya dan bergantung pada momentum tahunan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN). Perwakilan akademisi dari STISIP Bina Putera menjelaskan:

"Kami memasok analisis ilmiah mengenai akar patriarki di desa-desa perbatasan Kota Banjar. Sayangnya, intervensi edukasi kami sering terputus di tengah jalan karena sifatnya insidental, mengikuti jadwal pengabdian masyarakat dosen. Belum ada skema pembiayaan kolaboratif dari pemda untuk mengunci keberlanjutan program riset ini." (Wawancara, 17 Maret 2026).

Di sisi lain, keterlibatan dunia usaha (sektor swasta) menjadi titik paling rapuh dalam rantai tata kelola di Kota Banjar. Kontribusi pelaku usaha kuliner dan rumah makan lokal sejauh ini baru menyentuh tataran kondisional dan insidental. Melalui alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), mereka sebatas memberikan bantuan logistik darurat, pakaian, dan paket sembako untuk korban yang diisolasi di rumah aman (*safe house*). Sementara itu, rencana strategis hilir yang lebih substantif terkait pembukaan lapangan kerja dan pelatihan kemandirian finansial bagi penyintas perempuan masih mandek pada level wacana. Mengenai kendala ini, salah satu Pengusaha Kuliner lokal di Kota Banjar menuturkan:

"Kami tentu prihatin dan siap membantu kalau untuk urusan menyumbang sembako atau dana darurat bagi korban di rumah aman. Tapi kalau diminta memberikan kuota lowongan kerja khusus atau pelatihan rutin jangka panjang bagi korban kekerasan, kami jujur masih bingung skemanya. Belum ada pembagian peran yang konkret dari dinas, dan kami juga harus menghitung risiko bisnis serta kemampuan finansial usaha kami." (Wawancara, 5 April 2026).

Ketimpangan performa aktor ini berdampak fatal pada nasib penyintas. Pemulihan psikososial yang diupayakan pemerintah di sisi hilir menjadi kurang berdampak optimal karena korban tidak memiliki kemandirian finansial pasca-kasus. Akibatnya, karena faktor ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi kepada pelaku (yang biasanya merupakan kepala keluarga), korban terpaksa kembali ke lingkungan yang kasar demi menyambung hidup.

5. Capaian *Small Wins* (Keberhasilan Awal) dan Negosiasi Kepentingan Jangka Panjang

Meskipun dihantam oleh berbagai keterbatasan struktural berupa asimetri fiskal, kelemahan regulasi, dan ketiadaan data digital terpadu, jaringan kolaborasi rintisan di Kota Banjar ini telah berhasil menelurkan apa yang disebut Ansell dan Gash (2008) sebagai *small wins* (capaian-capaian kecil). Kehadiran inovasi lokal gerakan hulu-hilir seperti program "Gelung

Perak" (Gerakan Melindungi Perempuan dan Anak) yang diintegrasikan dengan posko rujukan teknis UPTD PPA berbasis Perwali 2025, terbukti mampu memotong rantai birokrasi dan mempercepat respons taktis penanganan pengaduan korban secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan awal ini merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga bagi Kota Banjar. Small wins ini memberikan bukti empiris kepada seluruh aktor triple helix bahwa potensi kolaborasi itu nyata dan mampu memberikan dampak positif, meskipun jalannya kelembagaan masih tertatih-tatih. Kepala Dinsos P3A Kota Banjar menegaskan arah negosiasi kepentingan ke depan:

"Inovasi Gelung Perak dan alur rujukan terpadu UPTD saat ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi kita bisa solid. Capaian kecil ini menjadi modal kami untuk terus merangkul pihak swasta kuliner dan kampus. Target negosiasi kami berikutnya adalah mengonkritkan wacana pemberdayaan ekonomi itu ke dalam draf regulasi daerah yang lebih luas, sehingga kerja sama ini punya kepastian hukum dan tidak layu di tengah jalan." (Wawancara, 22 April 2026).

Secara teoritis, hasil penelitian di Kota Banjar ini memperkaya khasanah studi *collaborative governance* dengan memberikan konseptualisasi baru: bahwa pada daerah dengan kapasitas kelembagaan dan fiskal terbatas, pencapaian *small wins* tidak secara otomatis mempercepat penguatan desain kelembagaan apabila tidak diimbangi dengan kepemimpinan fasilitatif yang mampu mentransformasikan komitmen informal menjadi regulasi formal yang mengikat sektor swasta secara berkelanjutan.

6. Matriks Analisis Penanganan Kasus Kekerasan di Kota Banjar Berdasarkan Model Ansell & Gash (2008)

Dimensi Kolaborasi (Ansell & Gash, 2008)	Indikator Ideal Teoretis	Realisasi Empiris di Kota Banjar	Status & Evaluasi Capaian Jaringan Tata Kelola
Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>)	Adanya keseimbangan kekuatan (<i>power</i>) dan insentif setara untuk berkolaborasi tanpa dominasi.	Pemerintah (Dinsos P3A & UPTD PPA) bertindak sebagai penggerak tunggal yang dominan; aktor non-pemerintah pasif.	Tinggi Asimetri Kapasitas: Terjadi relasi kuasa yang timpang akibat ketergantungan akut pada inisiatif birokrasi.
Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>)	Aturan main yang jelas, inklusif, transparan, dan mengikat secara formal lintas sektor.	Baru bersandar pada Perwali 2025 untuk internal birokrasi; belum ada payung hukum	Fragmentasi Regulasi: Aturan belum mengikat lingkaran dunia usaha; kemitraan swasta hanya

		kolektif dengan swasta dan kampus.	bersifat personal-sukarela.
Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	Pemimpin yang mampu merangkul, membangun <i>trust</i> , dan mengawal negosiasi visi bersama.	Kepala Dinsos P3A dan UPTD PPA aktif membuka ruang diskusi dengan kampus dan pelaku bisnis kuliner lokal.	Kepemimpinan Sektoral Baik: Berjalan efektif dalam birokrasi, namun belum mampu mengikat komitmen eksternal swasta.
Proses Kolaboratif (<i>Collaborative Process</i>)	Dialog tatap muka intensif, <i>trust building</i> , komitmen proses, dan meraih <i>small wins</i> .	Terjadi dialog rintisan, lahirnya inovasi "Gelung Perak", keterlibatan CSR sembako, dan wacana pelatihan kerja penyintas.	Berhasil Meraih <i>Small Wins</i> : Respons kasus lebih cepat, namun keberlanjutan terancam akibat asimetri data dan ego sektoral.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan collaborative governance model triple helix dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar baru berjalan pada tahapan keberhasilan awal yang belum seimbang (*unbalanced small wins*). Sektor pemerintah (Dinsos P3A dan UPTD PPA) bersama kepolisian telah menunjukkan gerak taktis yang responsif di sisi hilir melalui inovasi program "Gelung Perak" berdasarkan Perwali 2025, yang diimbangi kontribusi swadaya akademisi (STISIP Bina Putera dan Institut Miftahul Huda Al-Azhar) di lini hulu pencegahan. Namun, roda tata kelola ini mengalami hambatan struktural akibat lemahnya desain kelembagaan (*institutional design*) yang membuat keterlibatan sektor dunia usaha masih bersifat pasif, kondisional, dan sebatas bantuan logistik CSR insidental. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam isu perlindungan sosial sangat ditentukan oleh kapasitas komunikasi lintas sektor dan integrasi kelembagaan yang kokoh, bukan sekadar bersandar pada pendekatan personal atau komitmen kesukarelaan aktor swasta. Secara akademik, penelitian ini berhasil mengisi kekosongan literatur (*literature gap*) dengan mengonseptualisasikan hambatan tata kelola *triple helix* pada konteks daerah otonom kecil yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan, berbeda dengan mayoritas studi terdahulu yang didominasi lokus kota metropolitan mapan. Implikasi teoretisnya memperluas model Ansell dan Gash (2008) dengan membuktikan bahwa dalam ekosistem kelembagaan yang asimetris, pencapaian small wins di lapangan tidak

otomatis menguatkan struktur kolaborasi jika tidak ditopang oleh kepemimpinan fasilitatif yang mampu mentransformasikan komitmen informal menjadi regulasi daerah yang bersifat memaksa (*enforceable*). Keterlibatan sektor bisnis tidak boleh lagi diposisikan sebagai instrumen filantropi luar sistem, melainkan harus diintegrasikan secara terstruktur demi menjamin ketahanan finansial penyintas dan memutus mata rantai ketergantungan ekonomi yang memicu kekerasan domestik berulang. Sebagai kesimpulan akhir, potret rintisan kolaborasi di Kota Banjar menegaskan bahwa pencapaian hasil sementara (*small wins*) berupa percepatan respons pengaduan di lapangan belum menjadi jaminan terciptanya tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Penanganan kedaruratan yang solid di lini birokrasi masih terancam pincang selama pemulihan kesejahteraan jangka panjang korban di lini ekonomi terabaikan. Oleh karena itu, pelembagaan komitmen informal menjadi regulasi yang bersifat mengikat serta integrasi basis data satu pintu antar-instansi menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi agar jejaring tata kelola ini tidak layu di tengah jalan dan benar-benar mampu menghadirkan perlindungan sosial yang seutuhnya bagi perempuan dan anak. Sebagai langkah taktis ke depan, Pemerintah Kota Banjar direkomendasikan untuk segera meng-upgrade payung hukum sektoral menjadi Peraturan Daerah (Perda) formal yang secara eksplisit mengatur klaster insentif serta kewajiban hukum dunia usaha khususnya pelaku industri kuliner local dalam penyediaan ruang pelatihan kerja bagi penyintas. Selain itu, pembangunan platform basis data digital terpadu satu pintu (*one-gate system*) antar-instansi (UPTD PPA, Polres, dan Dinas Kesehatan) mutlak diperlukan guna mengikis asimetri informasi dan ego sektoral secara *real-time*. Terakhir, bagi pengembangan khazanah ilmiah, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif berbasis kapasitas fiskal antar-wilayah perbatasan, melakukan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) keterlibatan industri swasta, serta memperluas cakupan riset menggunakan pendekatan pentahelix dengan melibatkan unsur media dan komunitas sipil secara plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). *Kolaborasi pentahelix dalam pembangunan daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 15(2), 112–125.
- Andriani, N. (2021). *Peran pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jurnal Sosial Politik, 9(1), 55–67.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Azzahra, N. (2020). *Kolaborasi pentahelix dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bandung* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2025). *Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed communication and structural protocols*. *Public Administration Review*, 85(2), 210–225.

- <https://doi.org/10.1111/puar.13812> (Tambahan Jurnal Internasional Mutakhir)
- Chesnut, R. P., & Taylor, E. A. (2023). *Interorganizational communication in social policy networks: Breaking information asymmetry in crisis response*. *Social Sciences Quarterly*, 104(3), 415–430. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13254> (Tambahan Rumpun Komunikasi Sosial)
- Comfort, L. K., & Kapucu, N. (2024). *Governance networks and digital infrastructure: The role of data integration in multi-agency social collaboration*. *Public Management Review*, 26(4), 889–912. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2214567> (Tambahan Materi Hambatan Data Digital)
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). *The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university industry government relations*. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Hardiman, A., & Handayani, S. (2024). *Hambatan regulasi dan ego sektoral dalam tata kelola perlindungan anak di tingkat daerah otonom kecil*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asasi)*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.25139/asasi.v12i1.6112> (Tambahan SINTA 2 - Relevan Daerah Kecil)
- Hardy, C., Lawrence, T. B., & Grant, D. (2023). *Discourse and collaboration: The role of interorganizational communication in trust-building dynamics*. *Human Relations*, 76(5), 789–816. <https://doi.org/10.1177/00187267221113490> (Tambahan Materi Komunikasi Lintas Sektor)
- Hidayat, R., & Maulida, S. (2022). *Sinergi multipihak dalam penanganan kasus kekerasan anak*. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 4(3), 210–225.
- Islamy, L. O. S. H. (2018). *Collaborative governance: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jaelani, A. (2019). *Pembentukan model triple helix dalam pembangunan ekonomi daerah*. *Jurnal Tata Kelola dan Kemitraan Publik*, 5(2), 112–128.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications. (Tambahan Metode Analisis Bab 3)
- Nugroho, R., & Lestari, P. (2025). *Collaborative governance network dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender di wilayah penyangga*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 16(2), 185–204. <https://doi.org/10.18196/jsp.v16i2.19331> (Tambahan SINTA 2 Mutakhir)
- Sari, R. (2019). *Implementasi model pentahelix dalam pencegahan kekerasan berbasis gender*. *Jurnal Gender dan Anak*, 7(2), 78–93.
- Sari, R. P. (2020). *Implementasi Model Pentahelix dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandung* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Padjadjaran, Bandung.

- Sorensen, E., & Torfing, J. (2024). *Co-Creation and Collaborative Governance Network in Social Policy*. Oxford University Press. (Tambahan Buku Internasional Mutakhir)
- St George, J., & Fletcher, R. (2024). *Governance of gender-based violence response networks: Examining multiorganizational communication, trust building, and small wins*. *Violence Against Women*, 30(7), 1642–1665. <https://doi.org/10.1177/10778012231178411> (Tambahan Isu Gender & Small Wins)
- Utami, S. (2021). *Tantangan tata kelola kolaboratif penanganan kekerasan berbasis gender di tingkat lokal*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 45–60.
- Varda, D. H., & Shoup, J. A. (2025). *Evaluating information asymmetry and interorganizational trust in public health and social service governance networks*. *American Review of Public Administration*, 55(1), 34–49. <https://doi.org/10.1177/02750740241235612> (Tambahan Materi Trust Building & Asimetri Informasi)
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. SAGE Publications. (Tambahan Metode Desain Studi Kasus Bab 3)